

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD KOTA KOTAMOBAGU TERHADAP PAD SEKTOR KESEHATAN KOTA KOTAMOBAGU

Hendri D. Kolopita¹, Een N. Walewangko², Mauna Th. B. Maramis³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email : kolopitahendri.cipta@gmail.com, eenwalewangko@unsrat.ac.id, maunamaramis@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya meliputi beberapa interaksi dari komponen sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi, dan lain-lain yang bersangkutan. Sejak di terapkannya Otonomi Daerah di Indonesia, pemerintah daerah di berikan wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini adalah sumber pembiayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh pendapatan klaim JKN dan pendapatan klaim pelayanan Kesehatan Umum terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.

Metode Analisis yang digunakan Analisis dengan Analisis Regresi Dummy Variabel. Uji autokorelasi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai Uji Durbin Watson untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi dengan nilai Durbin Watson statistic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, dapat dilihat nilai Prob (F-statistik) $17,64037 > \alpha = 0.05$ yang berarti pendapatan klaim JKN dan pendapatan klaim pelayanan kesehatan umum secara bersama – sama berpengaruh terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.

Kata Kunci : PAD; Pelayanan Kesehatan; Sektor Kesehatan.

ABSTRACT

Economic growth basically includes several interactions of the components of human resources, natural resources, capital, technology, and other related components. Since the implementation of Regional Autonomy in Indonesia, regional governments have been given the authority to manage and arrange their own regional government affairs. Delegation of various authorities within the context of decentralization is a source of financing Local Revenue (PAD). In order to maximize the local revenue, the government strive to find potential sources of income while optimizing the sources of income that have been collected all this time. The purpose of this study is to see the effect of JKN claim revenue and public health service claim revenue on PAD Health Sector in Kotamobagu City.

The analytical method used analysis with dummy variable regression analysis. The autocorrelation test is carried out by testing the Durbin Watson test value to find the autocorrelation in a regression model with the Durbin Watson statistical value. The results of the study show that simultaneously, it can be seen in the Prob value (F-statistic) is $17.64037 > \alpha = 0.05$, which means JKN claim revenue and general health service claim revenue have an effect on PAD Health Sector in Kotamobagu City.

Keywords: PAD; Health services; Health Sector.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam mengurangi kemiskinan dan menghasilkan sumber daya yang diperlukan bagi pembangunan manusia dan perlindungan lingkungan. Perekonomian mengalami ekspansi jika ada pertumbuhan positif. Sebaliknya, perekonomian mengalami kontraksi jika pertumbuhannya negatif. Namun, pertumbuhan ekonomi saja tidak menjamin pembangunan manusia. Selain pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam statistik Produk Domestik Bruto dan pendapatan per kapita, diperlukan adanya

jaminan keamanan, tersedianya akses pendidikan dan layanan kesehatan dan pendidikan. Maka, berkembanglah konsep indeks pembangunan manusia (IPM).

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu sistem dari kegiatan ekonomi yang mengalami perubahan kearah yang lebih baik dari waktu ke waktu sehingga barang dan jasa yang diproduksi akan bertambah. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya meliputi beberapa interaksi dari komponen sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi, dan lain-lain yang bersangkutan. Suatu pertumbuhan harus mencerminkan perubahan secara total masyarakat atau kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok yang ada didalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik secara sosial, maupun material. (Hasan, M, 2016).

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari keberhasilan kebijakan yang di putuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih di kenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata (Kuncoro, 2010).

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 Tahun 1999.

Karena otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini.

Tabel 1

Target PAD Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2021 (dalam jutaan rupiah)

No	Nama Objek	2018	2019	2020	2021
1	BPKD	20.138	26.092	23.146	24.111
2.	Dinas Kesehatan	3.717	5.581	6.406	4.584
3.	RSUD Kotamobagu	37.000	38.000	31.277	49.108
4.	Dinas Lingkungan Hidup	780	948	924	930
5.	Dinas Perdagangan	768	935	814	893
6.	Dinas Perhubungan	1.832	2.083	2.557	3.721
7.	Satpol PP	62	112	60	85
8.	Dinas Pekerjaan Umum	1.025	1.397	1.087	1.156
9.	Dinas Pertanian	122	158	130	169
10.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	560	506	298	223
	TOTAL	66.005	76.643	66.702	84.984

Sumber : Laporan Target dan Realisasi PAD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2021

Berdasarkan Hasil Tabel. 1 terlihat bahwa PAD Kota Kotamobagu terus meningkat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya penambahan target pendapatan asli daerah khususnya pada Rumah Sakit umum daerah kotamobagu di Tahun 2021 ditambah dengan klaim pelayanan Pasien dengan Covid-19, sebelumnya target PAD hanya diperoleh melalui Pendapatan Pelayanan Kesehatan (Retribusi Pelayanan Kesehatan)

berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015, Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan berdasarkan klaim pelayanan pasien BPJS Kesehatan.

Penelitian oleh Brata, Aloysius (2004) menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena daerah lebih leluasa dalam memanfaatkan PAD sesuai dengan agenda pembangunan ekonominya. Akan tetapi hubungan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu ofensif dalam upaya meningkatkan penerimaan daerahnya. Sebagaimana diketahui, belakangan ini banyak pihak, khususnya dunia usaha, yang mengeluhkan soal begitu banyaknya pajak dan/atau retribusi yang justru menekan daya saing daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dijelaskan mengenai jenis pendapatan retribusi daerah adalah; (1) Retribusi Jasa Umum adalah retribusi Jasa Umum atas jasa yang diberikan atau disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan, (2) Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh sektor swasta, (3) Retribusi Perizinan Tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (A.Yani,2008.). Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pasal ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini. (a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu, (b) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, (c) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi, dan (d) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik. Salah satu yang termasuk dalam retribusi jasa umum adalah salah satunya retribusi pelayanan kesehatan.

Tabel 2
Realisasi Penerimaan PAD RSUD Kota Kotamobagu

No	Jenis Pendapatan	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
	TARGET PAD	37.000.000.000	38.000.000.000	31.277.000.000	49.108.000.000
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3,875,484,851	3,557,184,704	3,441,998,432	3,384,368,629
2.	Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan	32,228,279,761	19,756,727,277	34,522,736,653	26,286,471,527
3.	Covid-19				30,042,358,100
	TOTAL	36,103,791,614	23,313,911,981	37,964,735,085	59,713,198,256

Sumber : Laporan Keuangan Rumah Sakit Daerah Kotamobagu Tahun 2018-2021

Paparan pada Tabel 2 menjelaskan bahwa jumlah realisasi penerimaan PAD di Rumah Sakit Kotamobagu pada tahun 2020 – 2021 melampaui dari target yang diharapkan, namun tahun 2018 dan 2019 menunjukkan ketidakcapaian target yang diharapkan yaitu tahun 2018 target Rp. 37.000.000.000 dengan realisasi Rp. 36,103,791,614 (97,58%), begitu juga dengan tahun 2019 target yang diharapkan sebesar Rp. 38.000.000.000 tetapi yang terealisasi hanya sejumlah Rp. 23.313.911.981 (61,35%). Hal ini disebabkan karena menurunnya kunjungan pasien ke Rumah Sakit kotamobagu terutama pada Tahun 2019 pada masa awal pandemi covid-19.

Berdasarkan penelitian Annisa, 2018 hasil uji asumsi klasik maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Meski pun retribusi daerah tidak mempengaruhi secara keseluruhan namun jumlah pendapatan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar berpengaruh positif terhadap total PAD Kabupaten Tanah Datar dan tentunya juga didukung dengan komponen-komponen pendapatan asli daerah lainnya seperti Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan. 2. Berdasarkan hasil hipotesis uji t dapat disimpulkan bahwa pendapatan retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Yang mana dari perhitungan diperoleh t table -2.002 sedangkan t hitung 3.622 . Jadi nilai $-t$ Tabel $< -t$ hitung ($-2.002 < 3.622$), maka dapat disimpulkan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah $0,001$. Ini berarti nilai $Sig < 0,05$ maka kesimpulan H_0 ditolak. Artinya ada pengaruh antara pendapatan retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah tersebut.

Tabel 3
Realisasi PAD Dinas Kesehatan dan 5 (Lima) Puskesmas
Wilayah Kotamobagu Tahun 2021

No	Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	250.000.000	160.033.000
1.	Retribusi Pelayanan Non Kapitasi	205.545.802	157.709.400
2.	Pendapatan Dana Kapitasi (BPJS Kesehatan)	4.129.200.000	3.851.055.216
JUMLAH		4.584.745.802	4.168.797.616

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kotamobagu 2021

Berdasarkan tabel 3 realisasi PAD di dinas kesehatan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dari total target sejumlah Rp. 4.584.745.802 di tahun 2021 hanya dapat di penuhi sejumlah Rp. 4.168.797.616.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu sebagai Rumah Sakit Rujukan wilayah Bolaang Mongondow Raya dan Sebagian Minahasa Tenggara melalui surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 347 Tahun 2014 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Pelayanan Kesehatan Regional Di Provinsi Sulawesi Utara dan Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Izin Operasional dan penetapan RSUD Kelas C. Visi UPTD RSUD Kota Kotamobagu adalah “Menjadi Rumah Sakit Unggulan, Mandiri dan Berdaya Saing.

Objek pendapatan Asli daerah tertinggi di Kota Kotamobagu adalah pendapatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kota Kotamobagu , Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan “Analisis Pengaruh Pendapatan Pelayanan Kesehatan Terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu”.

Perumusan Masalah

Bagaimanakah Pengaruh Pendapatan Pelayanan Kesehatan Terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu sebelum dan dimasa Pandemi COVID 19?”

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- Pengaruh pendapatan klaim JKN terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.
- Pengaruh pendapatan klaim pelayanan Kesehatan Umum terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.
- Pengaruh pendapatan klaim JKN dan pendapatan klaim pelayanan Kesehatan Umum terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.

Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada :

- a. Penelitian di Indonesia khususnya tentang pengaruh Pendapatan Pelayanan Kesehatan Terhadap PAD Sektor Kesehatan.
- b. Masukkan terhadap Pemerintah Kota Kotamobagu terutama tentang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Rumah Sakit.
- c. Sebagai acuan untuk penetapan PAD bagi Rumah Sakit.
- d. Masukkan terhadap Pemerintah Kota Kotamobagu dalam penyusunan tarif Peraturan daerah pelayanan kesehatan (Peraturan Daerah Retribusi Kesehatan) di Rumah Sakit.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Pendapatan / Retribusi Pelayanan Kesehatan

Jenis Pelayanan Retribusi dalam Pasal 88 (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, meliputi:

- a) pelayanan kesehatan;
- b) pelayanan kebersihan;
- c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d) pelayanan pasar; dan
- e) pengendalian lalu lintas.

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. Retribusi Jasa Umum atau pendapatan pelayanan kesehatan di Rumah sakit umum daerah kotamobagu diperoleh melalui a). Retribusi Pelayanan Kesehatan b). Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan (Non kapitasi) c). Pelayanan Pasien dengan penyakit Covid – 19.

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi pelayanan kesehatan diperoleh berdasarkan pelayanan pada pasien umum dengan dasar pemungutan retribusi menggunakan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015. Dengan kata lain pembayaran pelayanan pasien umum menggunakan Metode pembayaran retrospektif adalah metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasar pada setiap aktifitas layanan yang diberikan, semakin banyak layanan kesehatan yang diberikan semakin besar biaya yang harus dibayarkan. Contoh pola pembayaran retrospektif adalah Fee For Services (FFS)

b) Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan (Non kapitasi) dan Pelayanan Pasien dengan penyakit Covid – 19.

Metode pembayaran prospektif adalah metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang besarnya sudah diketahui sebelum pelayanan kesehatan diberikan. Contoh pembayaran prospektif adalah global budget, perdiem, kapitasi dan case based payment.

Pada pelayanan pasien BPJS Kesehatan menggunakan Tarif INA-CBG, Tarif INA-CBG merupakan tarif paket yang meliputi seluruh komponen sumber daya rumah sakit yang digunakan dalam pelayanan baik medis maupun non-medis. Penghitungan tarif INA-CBG berbasis pada data costing dan data koding rumah sakit. Data costing merupakan data biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit baik operasional maupun investasi, yang didapatkan dari rumah sakit terpilih yang menjadi representasi rumah sakit. Sedangkan data koding diperoleh dari data klaim JKN.

Peneliti Terdahulu

Penelitian (Geralda J.P. Sulung, Een Walewangko, Irawaty Masloman, 2022) Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki tanda negatif akan tetapi tidak signifikan secara teori terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila pendapatan asli daerah meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan turun begitupula sebaliknya ceteris paribus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana transfer memiliki tanda negatif akan tetapi tidak signifikan secara teori terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila dana transfer meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan turun begitupula sebaliknya ceteris paribus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana transfer secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.

Penelitian (Watulingas, Kindangen, & Engka, 2018) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara dengan metode analisis regresi berganda, disimpulkan bahwa Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan fisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sulawesi utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah sulawesi utara berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sumber-sumber PAD yaitu pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang diharapkan dan diupayakan menjadi penyangga dalam membiayai kegiatan pembangunan daerahnya. Terdapat kegiatan erat antara penerimaan daerah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Rori, Luntungan dan Niode (2016) menganalisis Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan metode analisis regresi sederhana. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan (13 tahun) yang dipublikasikan di Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas atau Pendapatan Asli Daerah pengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau Pertumbuhan Ekonomi.

Sutianingsih, 2020 menganalisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan analisis deskriptif, melalui Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 masing-masing diperoleh data sebesar 16,82 persen, 22,83 persen, 7,88 persen, 6,16 persen, 6,76 persen dan 2,69 persen. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2014 termasuk kategori kurang baik, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2015 termasuk kategori cukup baik, dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2016 sampai dengan 2019 termasuk kategori sangat kurang baik karena kurang dari 10 persen. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada Kabupaten Lombok Utara tahun 2014 sampai dengan 2019 berada pada kategori sangat kurang baik sampai kategori cukup baik.

Hasil penelitian Sudarmana & Sudiartha (2020) tentang Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah menemukan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi daerah, dan pajak daerah secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung. Hasil ini memberi arti bahwa, semakin meningkatnya penerimaan dari pajak dan retribusi daerah akan mengakibatkan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Badung

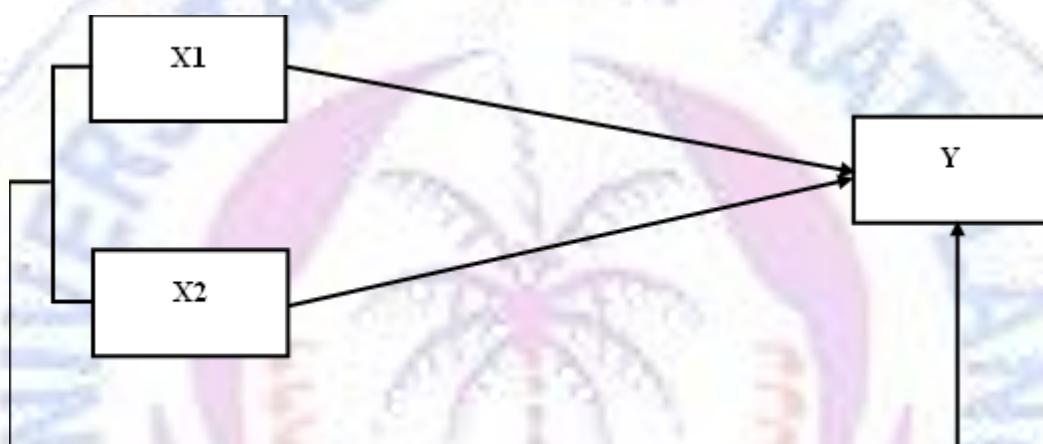
Berdasarkan hasil uji asumsi klasik maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Meski pun retribusi daerah tidak mempengaruhi secara keseluruhan namun jumlah pendapatan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar berpengaruh positif terhadap total PAD Kabupaten Tanah Datar dan tentunya juga didukung dengan komponen-komponen pendapatan asli daerah lainnya seperti Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan. Berdasarkan hasil hipotesis uji t dapat disimpulkan bahwa

pendapatan retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. (Annisa, 2018)

Eka Sri Mulyani, 2001. Berdasarkan analisis diperoleh nilai $\text{sig } 0,000 < 0,05$ dan nilai $t\text{hitung} = 7,587 > t\text{tabel} = 2,101$ menunjukkan terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, selain itu semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pertumbuhan ekonomi meningkat. Peningkatan PAD diperlukan dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki, agar dapat membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD.

Kerangka Pikir Penelitian

Dalam penelitian ini, total pendapatan klaim JKN dan total pendapatan klaim pelayanan Kesehatan Umum sebagai variabel X1 dan X2 yang akan dilihat korelasinya dengan Variabel Y yaitu Target PAD Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu. Hubungan pengaruh antara kedua jenis variable ini digambarkan sebagai berikut :



Hipotesis Penelitian

- Diduga terdapat pengaruh pendapatan klaim JKN terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.
- Diduga terdapat pengaruh pendapatan klaim pelayanan Kesehatan Umum terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.
- Diduga terdapat pengaruh pendapatan klaim JKN dan pendapatan klaim pelayanan Kesehatan Umum terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data dan Sumber Data Penelitian ini dibatasi dengan menganalisis data sekunder deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan data yang sebenarnya. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya.

Sumber data berasal dari berbagai sumber antara lain, Bagian Keuangan RSUD Kotamobagu, Bagian JKN RSUD Kotamobagu, jurnal-jurnal ilmiah dan literatur - literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Tempat dan Waktu Penelitian

Bagian Keuangan RSUD Kotamobagu, Bagian JKN RSUD Kotamobagu, jurnal-jurnal ilmiah dan literatur - literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Waktu penelitian yang digunakan sejak Bulan Oktober 2022 sampai dengan November 2022.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dengan mendatangi instansi terkait dan melakukan pengumpulan data sekunder di instansi tersebut. Melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan literatur/teori bahkan beberapa studi empiris sebelumnya yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pelayanan kesehatan.

Metode Analisis Regresi Dummy Variabel

Alat analisa yang dipakai untuk mengetahui ada tidaknya paradoks pertumbuhan ekonomi menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah salah satu teknik statistika yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen yang bersifat linier terhadap satu variabel dependen. Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) yaitu mengestimasi garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Gujarati, 2012).

Analisis dengan variabel dummy dilakukan untuk objek penelitian yaitu Pendapatan Pelayanan Kesehatan RSUD Kotamobagu sebagai Variabel independen dan target PAD Sektor Kesehatan Pemerintah Kota Kotamobagu sebagai variabel dependen. Dan adanya kondisi pandemi COVID 19 sebagai dummy variable.

Persamaan matematis untuk model regresi berganda dengan dummy variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 D_1 + e$$

Dimana:

Y = PAD Kesehatan

X_1 = Pendapatan Klaim JKN

X_2 = Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan Umum

D_1 = Dummy Pandemi COVID 19

e = Error term

β_0 = Intersep

$\beta_1 - \beta_4$ = koefisien regresi

Pengujian Hasil Persamaan Regresi

Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima. Dalam analisis regresi terdapat tiga jenis kriteria ketetapan (goodness of fit): (i) koefisien determinasi (ii) uji statistik F, dan (iii) uji statistik t.

Koefisien Determinasi.

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.

Formula menghitung koefisien determinasi adalah:

$$R^2 = (TSS - SSE) / TSS = SSR / TSS$$

Keterangan:

TSS = total jumlah kuadrat

SSE = jumlah pangkat error

SSR = jumlah pangkat karena regresi

Uji signifikan simultan (Uji statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$$H_0: b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a), tidak semua parameter secara simultan sama

dengan nol, atau:

$$H_a: b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Pyndick, 1998)

Uji signifikansi individual (Uji statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi-variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol, atau:

$$H_0: b_i = 0$$

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel independen.

Hipotesis alternatif parameter suatu variabel tidak sama dengan nol.

$$H_a: b_i \neq 0$$

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2013:244).

Pengujian Model dengan Asumsi Klasik

Pengujian model terhadap asumsi klasik diberlakukan pada persamaan struktural yang meliputi:

Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya distribusi faktor gangguan (residual). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik adalah dengan grafik histogram dan melihat normal probability plot yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Sedangkan uji statistik dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual.

Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas, menurut Frisch dikemukakan bahwa suatu model regresi dikatakan terkena multikolinieritas bila terjadi hubungan linier yang perfect atau exact di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan. Terjadinya multikolinieritas yang rawan pada model regresi bisa dideteksi keberadaannya bila R² dari auxilary regression melebihi R² regresi keseluruhan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas model yang diteliti. Selain itu jika nilai varian inflation faktor (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinieritas.

Uji Heteroskedasitas

Heteroskedasitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian antar seri data. Heteroskedasitas muncul apabila nilai varian dari variabel tak bebas (Y_i) meningkat sebagai meningkatnya varian dari variabel bebas (X_i), maka varian dari Y_i adalah tidak sama. Gejala heteroskedasitas lebih sering dalam data cross section dari pada time series. Selain itu juga sering muncul dalam analisis yang menggunakan data rata-rata. Untuk mendeteksi keberadaan heteroskedasitas digunakan metode grafik scatter plot, uji White, dimana apabila nilai probabilitas $n(p\text{ value})$ observasi R² lebih besar dibandingkan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan $\alpha = 5\%$), maka residual digolongkan homoskedasitas.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data time series walaupun dapat juga terjadi pada data cross section. Dalam data time series observasi diurutkan menurut urutan waktu secara kronologis. Maka dari itu, besar kemungkinan akan terjadi interkorelasi antara observasi yang berurutan, khususnya kalau interval antara dua observasi sangat pendek. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan uji Lagrange Multiplier (LM test) dimana apabila probabilitas f hitung $> \alpha (5\%)$, maka bebas dari autokorelasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Adapun Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Model persamaan dalam penelitian ini adalah model regresi dengan dummy variable adalah sebagai berikut :

Sehingga model emi log (model Lin-Log), dimana transformasi hanya dilakukan terhadap variable bebas saja atau X_1 , X_2 dan X_3 sementara variable Y tetap dalam bentuk linier. Dengan demikian persamaan model ini dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 D_1 + e$$

Tabel 4
Hasil Regresi

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/08/22 Time: 02:29
Sample (adjusted): 2 48
Included observations: 47 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.51E+09	95918252	26.12983	0.0000
X1	4.25E+08	2.03E+08	2.096704	0.0418
X2	4.20E+08	2.10E+08	1.996706	0.0521
D01	2.79E+08	1.40E+08	1.990673	0.0529
R-squared	0.756869	Mean dependent var	2.64E+09	
Adjusted R-squared	0.713963	S.D. dependent var	4.88E+08	
S.E. of regression	4.79E+08	Akaike info criterion	42.89451	
Sum squared resid	9.88E+18	Schwarz criterion	43.05197	
Log likelihood	-1004.021	Hannan-Quinn criter.	42.95376	
F-statistic	17.64037	Durbin-Watson stat	0.360485	
Prob(F-statistic)	0.000018			

Persamaan regresi yang terbentuk dari hasil pengolahan data menggunakan EViews 12 adalah sebagai berikut :

$$Y = 2,51E+09 + 4,25E+08X_1 + 4,20E+08 X_2 + 2,79E+08 D_1 + e$$

Uji Statistic F

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama – sama terhadap variabel tetap. Dari hasil pengolahan menggunakan eviews dapat dilihat Prob (F-statistik) 0,00018. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.01$, Prob (F-statistik) 0,000018 > $\alpha = 0.01$,

$$Ha: b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Yang artinya semua variabel bebas (X_1 , dan X_2) secara bersama – sama atau simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.

Uji Statistic t

Berdasarkan hasil t pada tabel analisis regresi berganda dengan aplikasi eviews menunjukkan adanya tingkat signifikansi Variabel pendapatan klaim JKN (X_1) dan jumlah klaim pelayanan kesehatan umum (X_2) terhadap PAD Sektor Kesehatan di Kota Kotamobagu.

1. Variabel Pendapatan klaim JKN (X_1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0418. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Nilai probabilitas X_1 0,0418 > 0,05, berarti H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Pendapatan Klaim JKN (X_1) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.
2. Variabel Pendapatan klaim pelayanan kesehatan umum (X_2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0521 . Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.1$, Nilai probabilitas X_2 0,0521 < 0,01, berarti H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel klaim pelayanan kesehatan

umum (X_2) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.

3. Variabel Dummy Pandemi COVID 19 (D_1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0529 . Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, nilai probabilitas D_1 $0,0529 < 0,05$, berarti H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel dummy pandemi (D_1) mampu membedakan PAD sektor kesehatan dimasa sebelum pandemi dan dimasa pandemi di Kota Kotamobagu.

Koefisien Determinasi

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien determinasi (Adj. R^2) sebesar 0.713963 atau 71,39 % . Hal ini menunjukkan bahwa variabel – variabel independent dalam hal ini pendapatan klaim JKN (X_1), dan pendapatan klaim pelayanan kesehatan umum (X_2) secara bersama – sama memiliki pengaruh 71,39% terhadap PAD Sektor kesehatan Kota Kotamobagu. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

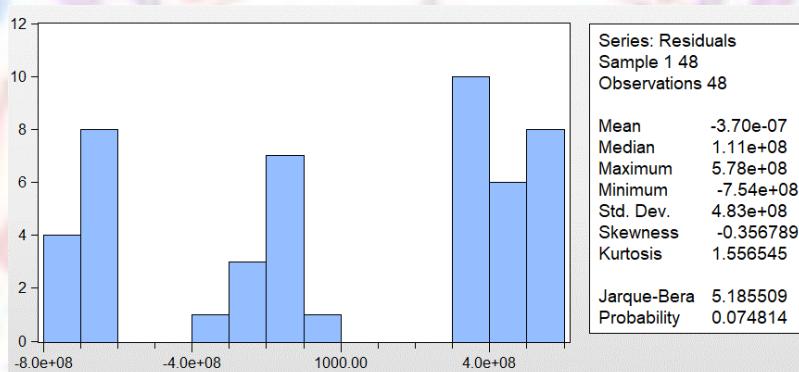
• Pengujian Model dengan Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya distribusi faktor gangguan (residual). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik adalah dengan grafik histogram dan melihat normal probability plot yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Sedangkan uji statistik dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual.

Untuk menguji data pada penelitian ini terdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque Bera test (J-B).

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Hasil olah data Eviews 12

Berdasarkan tabel uji normalitas di atas, nilai probabilitas Jargue-Bera ($5,15m7$) $0,> \alpha$ ($0,05$) maka H_0 diterima. Karena H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.

Tabel 5
Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
 Date: 12/08/22 Time: 03:10
 Sample: 1 48
 Included observations: 48

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.46E+16	6.970427	NA
X2	0.275918	6.970427	1.000000

Sumber : Hasil olah data Eviews 12

Untuk melihat apakah model mengalami multikolinearitas, jika nilai varian inflation faktor (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinieritas. Dari hasil uji multikolinearitas pada model ini, inflation faktor (VIF) pada X_1 , $X_2 < 10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Tabel 6
Uji White

Heteroskedasticity Test: White
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.654015	Prob. F(3,10)	0.2391
Obs*R-squared	4.642991	Prob. Chi-Square(3)	0.1999
Scaled explained SS	1.030337	Prob. Chi-Square(3)	0.7939

Sumber : Hasil olah data Eviews

Dari hasil uji Heteroskedastisitas dengan uji white menggunakan Eviews dapat dilihat bahwa nilai probabilitas observasi R2 sebesar 0,1999 jika dibandingkan dengan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan $\alpha = 5\%$), $0,1999 > 0,05$ artinya residual digolongkan homoskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai Uji Durbin Watson untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi dengan nilai Durbin Watson statistic. Hasil run eviews menunjukkan bahwa nilai DW statistic adalah 0,360485 atau kurang dari 2 artinya tidak ada autokorelasi.

Berdasarkan Persamaan dan hasil pengujian – pengujian diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Secara parsial, pendapatan klaim JKN berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD sektor kesehatan. Nilai koefisien regresi pendapatan klaim JKN sebesar 4,25E+08.
2. Secara parsial, pendapatan klaim pelayanan kesehatan umum signifikan dan positif terhadap PAD sektor kesehatan. Nilai koefisien regresi pendapatan klaim pelayanan kesehatan umum adalah sebesar 4,20E+08.
3. Secara parsial, terdapat perbedaan PAD kesehatan sebelum pandemi dan dimasa pandemi COVID 19 yang ditandai dengan adanya perbedaan pendapatan yang diperoleh dari klaim JKN dan klaim pelayanan kesehatan umum saat pandemi.

4. Secara simultan, dapat dilihat nilai Prob (F-statistik) $17,64037 > \alpha = 0.05$ yang berarti pendapatan klaim JKN dan pendapatan klaim pelayanan kesehatan umum secara bersama – sama berpengaruh terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.

Pembahasan

Berdasarkan hasil olahan data, ternyata pendapatan klaim JKN dan klaim pelayanan kesehatan umum mempengaruhi PAD kesehatan, sama seperti hasil penelitian Watulingas (2018), Sutianingsih (2020), Sartika dkk (2019), Sudarman dan Sudiartha (2020), Anissa (2018).

Berdasarkan hasil Analisis regresi linier berganda dapat dilihat hasil analisis pengaruh dari masing – masing variabel independen (X_1, X_2) terhadap variable dependen (Y) sebagai berikut :

Pengaruh pendapatan klaim JKN terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.

Variabel Pendapatan klaim JKN (X_1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0418. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Nilai probabilitas $X_1 0,0418 > 0,05$, berarti H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Pendapatan Klaim JKN (X_1) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.

Pengaruh pendapatan klaim pelayanan Kesehatan Umum terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.

Variabel Pendapatan klaim pelayanan kesehatan umum (X_2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0521 . Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Nilai probabilitas $X_2 0,0521 < 0,05$, berarti H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel klaim pelayanan kesehatan umum (X_2) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.

Pengaruh pendapatan klaim JKN dan pendapatan klaim pelayanan Kesehatan Umum terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.

Uji autokorelasi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai Uji Durbin Watson untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi dengan nilai Durbin Watson statistic. Hasil run eviews menunjukkan bahwa nilai DW statistic adalah 0,360485 atau kurang dari 2 artinya tidak ada autokorelasi. Secara simultan, dapat dilihat nilai Prob (F-statistik) $17,64037 > \alpha = 0.05$ yang berarti pendapatan klaim JKN dan pendapatan klaim pelayanan kesehatan umum secara bersama – sama berpengaruh terhadap PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pendapatan klaim JKN berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD Sektor Kesehatan di Kota Kotamobagu.
2. Pendapatan klaim pelayanan kesehatan umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD Sektor Kesehatan di Kota Kotamobagu.
3. Secara bersama-sama klaim JKN dan klaim pelayanan kesehatan umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Sektor kesehatan di Kota Kotamobagu.

Saran

1. Jasa layanan kesehatan merupakan upaya yang esensial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat. peningkatan inflasi dimana tingkat inflasi tahunan rata-ratanya dalam kurun waktu 10 tahun adalah sebesar 4,23%, perlu untuk dilakukan revisi tarif retribusi kesehatan. Dengan adanya revisi tarif maka pendapatan dari klaim pelayanan kesehatan umum dan klaim JKN akan meningkat dan otomatis berpengaruh pada target PAD Sektor Kesehatan Kota Kotamobagu.
2. RSUD kotamobagu terus meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan pendapatan pelayanan kesehatan melalui : Pendaftaran Online (SIMRS

online), Pembayaran pelayanan kesehatan umum online, penambahan Ruangan/ Kamar operasi dengan teknologi yang lebih canggih, Pelayanan Operasi katarak, Pelayanan Operasi THT, alat penunjang Pemeriksaan jantung dengan teknik *treadmill* dan *echo*, Poli rehab medik dengan sarana terlengkap yang ada di kotamobagu, Jejaring pemeriksaan Laboratorium dengan PT. prodia, Pelaksanaan Diklat dan In house Training bagi Tenaga Kesehatan dan Non kesehatan RSUD Kotamobagu serta penambahan tenaga Dokter Spesialis

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, 2008**, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, cet. III, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Annisa Nabilatul Khaira, 2018**, Pengaruh Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Tanah Datar, Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
- Brata, Aloysius Gunadi. 2004.** Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/9061>
- Eka Sri Mulyani, 2020**, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Timur 2020, Universitas Mulawarman
- Geralda J.P Sulung1 , Een N. Walewangko2 , Irawaty Masloman, 2022**, Jurnal Berkala Efisiensi Volume 22 No. 5 Bulan Juli 2022, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Transfer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado,
- Hasan, M, 2016**, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 4 No. 11
- Kuncoro, Mudrajad 2010.** Otonomi dan Pembangunan Daerah, Fokusmedia, Jakarta
- Risky Joko Manaida, Adisti A. Rumayar, Grace D. Kandou. 2017.** analisis prosedur pengajuan klaim badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan di rawat inap rumah sakit umum pancaran kasih gmim manado. Vol 6, no 3.
- Rory, C. F., Luntungan, A. Y., & Niode, A. O. (2016).** Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16 No.02.
- Sulaiman, M. 2020,** Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan. Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Mulawarman
- Supit Watulingas, C. A., Kindangen, P., & Engka, D. S. (2018).** Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Volume 19 No.3.
- Sutianingsih, Shinta Eka Kartika, Widowati, 2020**, Analisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, Mataram, Indonesia Regional Retribution and Revenue
- Sudarmana, I Putu. A, Sudiartha, G. M. 2020.** Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i04.p06> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia. E-Jurnal Manajemen, Vol. 9, No. 4, 2020 : 1338-1357.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004. tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2004. Undang - Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah.